

ABSTRACT**Evaluation of Local Public Service Agency's Policy on Working
Units of Primary Healthcare Centers
(A Study in Primary Healthcare Centers of Kediri District)**

Primary healthcare centers, healthcare facilities working closely with the community, often have problems with financial issues. To overcome these issues, the Indonesian government has offered a solution by changing the status of primary healthcare centers to be a local public service agency. This study aimed to evaluate the policy implementation of the local public service agency in primary healthcare centers according to the Regulation of the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs Number 79 of 2018 as the basis for formulating recommendations to transform primary healthcare centers to local public service agencies in Kediri district. The evaluation shows that the regional government has contributed to the policy formulation according to the regulation although there were some flaws in the process. However, they were still suboptimal in monitoring and evaluating, and guiding the process. The policy was considered lacking and necessary to be revised. Regarding the role of the district health office, they performed their tasks as facilitators, supervisors, and controllers quite well, but the frequency and division of the tasks need to be re-arranged. While the primary healthcare centers did not implement the policy well because they had a poor understanding of the principles of the local public service agency policies. Furthermore, staff competence was lacking due to overload tasks unsuitable with the assigned tasks. Also, the staff support for policy implementation was the other point that should be highlighted. In conclusion, the implementation of the local public service agency policy in Blitar district has not worked optimally and needs some revisions, especially by considering the constraints. A regional regulation on the policy is required, and forming SOPs for supervision and controlling may encourage the optimal performance of the policy. Replacement and recalculation of workload and staff are feasible to make the policy implementation run smoothly. Refreshing activities or internal and joint training on the policy are other possible efforts.

Keywords: Policy Implementation, Local Public Service Agency-Primary Healthcare Centers, Evaluation.

ABSTRAK**Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Kerja Puskesmas (Studi pada Puskesmas di Wilayah Kota Kediri)**

Puskesmas dalam menyelenggarakan kesehatan dasar terdekat di masyarakat seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan yang harus segera diatasi. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah menawarkan solusi dengan merubah status Puskesmas menjadi BLUD. Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan BLUD di Puskesmas sesuai dengan Permendagri 79 Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan penetapan Puskesmas menjadi sebuah BLUD di Kota Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif. Unit analisis dalam penelitian adalah Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi pada faktor Pemerintah Daerah, peran Pemerintah Daerah dalam proses *policy formulation* telah sesuai dengan yang dimandatkan dalam Permendagri 79 tahun 2018 walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam prosesnya, selain itu peran lain seperti halnya melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan serta regulasi masih dirasa kurang optimal dan membutuhkan perbaikan. Berdasarkan faktor Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan telah cukup menjalankan tugasnya sebagai fasilitator maupun pengawas dan pengendali, namun dari sisi frekuensi dan pembagian tugas perlu lebih dilakukan penataan kembali. Berdasarkan faktor Puskesmas, ditemukan hasil bahwa terdapat ketidakefektifan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan Puskesmas disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kurangnya pemahaman terhadap seluk beluk BLUD, kompetensi pegawai yang melaksanakan kebijakan juga masih kurang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan serta beban kerja yang berlebih, namun terdapat juga hal yang sebenarnya dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas ini yaitu sikap para pegawai yang mendukung terhadap keberadaan kebijakan BLUD Puskesmas tersebut. Kesimpulan yaitu bahwa penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kota Kediri belum berjalan secara optimal dan masih membutuhkan perbaikan di beberapa hal, terutama pada poin yang menjadi penghambat. Untuk itu perlu dibuat peraturan daerah yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas, perlu dibuat SOP untuk mengawal proses pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dapat berjalan lebih maksimal, perlu dilakukan penataan dan perhitungan ulang terhadap beban kerja dan penempatan pegawai serta jika memungkinkan hendaknya dapat dilakukan refreshing atau pelatihan internal maupun gabungan terkait kebijakan BLUD Puskesmas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, BLUD Puskesmas, Evaluasi.